

# PERAN BAPPELITBANGDA DALAM TRANSFORMASI BENTENG ORANJE SEBAGAI RUANG PUBLIK (STUDI PERENCANAAN, TATA RUANG, DAN KEBIJAKAN DAERAH DI KOTA TERNATE)

## *The Role of Bappelitbangda in the Transformation of Benteng Oranje as a Public Space (A Study of Planning, Spatial Arrangement, and Regional Policy in Ternate City)*

Supriyadin Haruna<sup>1\*</sup>  
Sahrony A. Hirto<sup>1</sup>  
Darwin Abd Radjak<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah  
Maluku Utara, Ternate

\*corresponding author:  
[darwinbila20@gmail.com](mailto:darwinbila20@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran BAPPELITBANGDA dalam transformasi Benteng Oranje, Ternate, dari situs bersejarah yang disfungsi menjadi ruang publik yang dinamis. Permasalahan utamanya adalah pelubangan fungsi oleh aktivitas militer dan pedagang kaki lima yang mengaburkan nilai historis benteng. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep perencanaan, tata ruang, dan kebijakan daerah yang diterapkan BAPPELITBANGDA untuk merevitalisasi benteng. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pejabat BAPPELITBANGDA, BPCB, komunitas, dan analisis dokumen seperti RTRW Kota Ternate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPELITBANGDA berhasil mengoordinasikan konsep perencanaan berbasis keberlanjutan dan keberlanjutan. Implementasi strategi "3P" (Perlindungan, Pelestarian, Pemanfaatan) sejalan dengan dimensi perencanaan Friedmann, menciptakan peluang ekonomi bagi UMKM dan menguatkan identitas budaya. Peraturan Daerah RTRW menjadi fondasi legal yang krusial. Transformasi ini menegaskan peran vital administrasi daerah dalam pengelolaan cagar budaya dan pengembangan ruang publik berkelanjutan.

**Kata Kunci:**  
Benteng Oranje  
Ruang publik  
Perencanaan kota  
Kebijakan daerah

**Keywords:**  
Benteng Oranje  
Public space  
Urban planning  
Regional policy

### Abstract

This study examines the crucial role of BAPPELITBANGDA in transforming Fort Oranje, Ternate, from a dysfunctional historical site into a dynamic public space. The core problem was the functional encroachment by military activities and street vendors, obscuring the fort's historical value. The research aims to analyze the planning concepts, spatial arrangements, and regional policies implemented by BAPPELITBANGDA to revitalize the fort. Employing a qualitative-descriptive approach, data was collected through participatory observation, in-depth interviews with BAPPELITBANGDA officials, BPCB, local communities, and analysis of documents like Ternate City's Spatial Plan (RTRW). The findings indicate that BAPPELITBANGDA successfully coordinated a planning concept based on utility and sustainability. The implementation of the "3P" strategy (Protection, Preservation, Utilization) aligned with Friedmann's planning dimensions, generating economic opportunities for local SMEs and strengthening cultural identity. The regional RTRW served as a crucial legal foundation. This transformation affirms the vital role of local administration in heritage management and sustainable public space development.



© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <http://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index>

Submite: 02-11-2025

Accepted: 20-11-2025

Published: 25-11-2025

## PENDAHULUAN

Ruang publik sebagai entitas fundamental dalam kajian ilmu sosial dan perencanaan kota telah menjadi fokus utama dalam memahami dinamika interaksi masyarakat dan pembangunan urban. Konsep ini, yang juga dikenal sebagai public sphere dalam tradisi Anglo-Saxon atau "Offentlichkeit" dalam konteks Jerman, merepresentasikan lebih dari sekadar area fisik; ia adalah ranah di mana

masyarakat dapat berkumpul, berinteraksi, dan membentuk opini kolektif (Hardiman, 2014). Secara esensial, ruang publik diidentifikasi sebagai aset krusial yang menopang watak sosial masyarakat, memfasilitasi transformasi dari kerumunan (crowd) yang pasif menjadi komunitas (community) yang aktif dan berkesadaran (Hardiman, 2014).

Dalam konteks yang lebih luas, ruang publik tidak hanya menjadi hak prerogatif pemerintah atau terbatas pada taman kota semata, melainkan juga mencakup media massa dan *platform* digital yang semuanya berfungsi sebagai kebutuhan esensial manusia untuk berinteraksi, berekreasi, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sipil (Staab & Thiel, 2022)(Schreiber, 2020). Peran ruang publik menjadi sangat vital dalam membentuk karakter dan identitas kota, berfungsi sebagai katalisator interaksi sosial, pendorong aktivitas ekonomi lokal, serta media untuk apresiasi dan ekspresi budaya. Sebagai pusat orientasi dan penanda identitas kawasan, ruang publik menampung berbagai aktivitas budaya masyarakat, dan secara signifikan berkontribusi pada peningkatan solidaritas serta kepedulian sosial (Bravo et al., 2022)(Luger & Lees, 2022).

Kota Ternate menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola dan mengembangkan ruang publik, terutama yang memiliki nilai historis dan strategis. Benteng Oranje, sebuah situs bersejarah peninggalan Kolonial Belanda, merupakan salah satu contoh representatif dari tantangan ini. Dibangun pada tahun 1607 dan awalnya dikenal sebagai Fort Melayu, benteng ini kemudian diganti namanya menjadi Fort Oranje pada tahun 1609 oleh Gubernur Belanda pertama, Paulus van Carden (Amal, 2010). Sebagai saksi bisu perjalanan historis dan strategis Ternate sebagai salah satu pusat perdagangan rempah dunia, Benteng Oranje memiliki nilai intrinsik yang tak ternilai. Namun, pasca kemerdekaan, benteng ini mengalami perubahan fungsi yang signifikan, termasuk sempat digunakan sebagai markas militer oleh TNI-AD dan kepolisian.

Seiring dengan percepatan pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Kota Ternate, serta tekanan urbanisasi yang tak terhindarkan, kawasan di sekitar Benteng Oranje menghadapi pembangunan fisik yang cenderung tidak terencana. Fenomena ini, yang ditandai dengan peluberan fungsi permukiman dan komersial, termasuk maraknya keberadaan pedagang kaki lima di area

benteng, menyebabkan situs bersejarah ini terkesan kumuh dan tidak teratur (Oesman et al., 2023). Kondisi ini menciptakan dilema akut antara kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendesak dan urgensi pelestarian cagar budaya yang merupakan warisan tak benda bangsa. Konflik kepentingan antara pemanfaatan ekonomi informal dan tujuan pelestarian cagar budaya seringkali menjadi persoalan klasik dalam administrasi pembangunan perkotaan (Tarrafa Silva et al., 2023). Tanpa perencanaan dan intervensi kebijakan yang tepat, situs bersejarah berpotensi kehilangan makna dan fungsinya sebagai ruang publik yang bernilai.

Pentingnya perencanaan tata ruang, baik untuk area publik maupun privat, menjadi sangat krusial dalam konteks ini, mengingat Benteng Oranje memiliki nilai historis, edukatif, dan kultural yang tinggi. Pengelolaan ruang publik banyak dihadapkan pada kendala implementasi, meskipun landasan hukum telah tersedia. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang yang komprehensif sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, khususnya Pasal 20 ayat (1) dan (2), menggarisbawahi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan penataan ruang serta pentingnya partisipasi masyarakat. Dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012, menjadi instrumen kebijakan yang fundamental dalam mengarahkan pemanfaatan dan pengelolaan ruang. RTRW ini memuat visi, misi, tujuan pembangunan, serta ruang lingkup pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah, yang dirumuskan sebagai arah politik pembangunan agar tercipta secara efektif sesuai dengan rencana induk wilayah.

Dalam konteks administratif, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

(BAPPELITBANGDA) Kota Ternate memegang peran sentral sebagai koordinator perencanaan pembangunan di tingkat lokal. BAPPELITBANGDA bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan rencana, serta mengevaluasi program-program yang telah berjalan. Oleh karena itu, studi tentang Benteng Oranje sebagai ruang publik tidak dapat dilepaskan dari peran strategis BAPPELITBANGDA dalam mengintegrasikan berbagai aspek perencanaan, tata ruang, dan kebijakan daerah. Pemahaman mengenai bagaimana BAPPELITBANGDA menjalankan mandatnya dalam menghadapi tantangan pelestarian cagar budaya dan pengembangan ruang publik yang berfungsi optimal menjadi sangat relevan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan urgensi tersebut, penelitian ini mengkaji "Peran BAPPELITBANGDA dalam Transformasi Benteng Oranje sebagai Ruang Publik: Studi Perencanaan, Tata Ruang, dan Kebijakan Daerah di Kota Ternate". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana konsep perencanaan dan tata ruang telah diterapkan dalam merevitalisasi Benteng Oranje, bagaimana regulasi dan kebijakan daerah menjadi kerangka kerja, serta bagaimana BAPPELITBANGDA menjalankan fungsi koordinatifnya untuk memastikan Benteng Oranje dapat berfungsi sebagai ruang publik yang dinamis, historis, dan berkelanjutan bagi masyarakat Ternate. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan administrasi publik dan pembangunan kota, khususnya dalam pengelolaan cagar budaya dan ruang publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran BAPPELITBANGDA dalam transformasi Benteng Oranje sebagai ruang publik, khususnya terkait perencanaan, tata ruang, dan kebijakan daerah di Kota

Ternate. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial, menangkap perspektif para aktor, dan menginterpretasi makna di balik tindakan serta kebijakan (Creswell & Creswell, 2004). Sifat deskriptif penelitian ini bertujuan menyajikan gambaran komprehensif tentang kondisi, proses, dan hasil perencanaan serta pengelolaan Benteng Oranje tanpa pengujian hipotesis statistik.

Lokasi penelitian difokuskan pada kantor BAPPELITBANGDA Kota Ternate sebagai pusat perencanaan kebijakan, dan Benteng Oranje sebagai objek studi implementasi di lapangan. Periode pengumpulan data berlangsung dari Agustus 2023 hingga Januari 2024, memastikan cakupan waktu yang memadai untuk memperoleh data relevan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Observasi dilakukan di Benteng Oranje untuk memahami aktivitas sosial-ekonomi, dinamika pengunjung, dan pemanfaatan ruang oleh komunitas serta UMKM (Patton, 2015). Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, termasuk pejabat BAPPELITBANGDA (Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Kabid Penelitian dan Pengembangan), perwakilan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), serta ketua komunitas dan pelaku UMKM terkait. Wawancara ini didasarkan pada pedoman semi-terstruktur untuk eksplorasi topik yang fleksibel (Kvale & Brinkmann, 2009).

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur pendukung, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, serta Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW. Laporan internal BAPPELITBANGDA dan publikasi ilmiah relevan juga digunakan. Triangulasi data

dari berbagai sumber ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan (Sugiyono, 2019).

Analisis data mengikuti model interaktif yang bersifat siklis, meliputi: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014).

## HASIL

Bagian ini menyajikan temuan-temuan kunci dari observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait peran BAPPELITBANGDA dalam transformasi Benteng Oranje sebagai ruang publik di Kota Ternate.

### Manfaat Benteng Oranje secara Kebudayaan

Temuan menunjukkan bahwa revitalisasi Benteng Oranje sebagai ruang publik telah memperkuat identitas kebudayaan Ternate, sebagaimana disampaikan beberapa informan.

“... Benteng Oranje adalah identitas historis Ternate sebagai kota rempah yang penting di dunia..” (Zandry Aldrin, Ketua JARKOT Korda Malut)

“... pemanfaatan benteng sebagai ruang publik adalah kunci untuk menjaga dan memelihara identitas kebudayaan benteng sebagai ikon kota...” (M. Rukkah Harisun, Ketua Komunitas Ternate Creative Space)

Aktivitas komunitas dan UMKM secara aktif berkontribusi pada pelestarian bangunan sejarah ini, dengan beragam kegiatan dan event yang menghidupkan benteng, memperkenalkan sejarahnya, dan menarik wisatawan. Hal ini menciptakan interaksi lintas komunitas, warga, agama, dan latar belakang sosial.

### Konsep Perencanaan Ruang Publik di Benteng Oranje

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa konsep perencanaan Benteng Oranje sebagai ruang publik

didasarkan pada prinsip kebermanfaatan dan keberlanjutan.

“...proses perancangan melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kota Ternate, perwakilan Kementerian (BPCB), dan komunitas lokal...” (M. Saifullah, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPELITBANGDA)

“...perencanaan ini berorientasi pada konsep perkotaan yang holistik...” (Munisa, Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam BAPPELITBANGDA)

“...perencanaan ini secara spesifik diperuntukkan bagi pengembangan komunitas dan sangkar budaya, untuk menjaga identitas benteng melalui aktivitas yang memperkenalkan sejarahnya...” (Lasmiyati, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPELITBANGDA)

Proses perancangan dan perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Kota Ternate, lembaga pemerintah pusat (BPCB), dan komunitas lokal, dengan pendekatan perkotaan yang holistik. Tujuan utama perencanaan ini adalah untuk mengembangkan komunitas dan ruang budaya yang berfungsi menjaga serta memperkuat identitas historis benteng melalui berbagai aktivitas yang memperkenalkan nilai dan sejarahnya kepada masyarakat.

### Rencana Strategi Pengembangan Ruang Publik dan Dimensi Perencanaan *Friedmann*

Strategi pengembangan ruang publik di Benteng Oranje difokuskan pada tiga pilar utama: Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan (“3P”), sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan “M. Rukkah Harisun”. Strategi ini bertujuan menjaga kedikdayaan Benteng Oranje sebagai miniatur kota. Hasil penelitian juga menunjukkan manifestasi empat dimensi perencanaan *Friedmann* (1987) dalam kasus Benteng Oranje:

- a. Perencanaan sebagai Cara Memikirkan Persoalan-Persoalan Sosial Ekonomi

Pemanfaatan benteng berdampak positif pada sosial ekonomi masyarakat, menciptakan peluang usaha bagi UMKM lokal dan meningkatkan pendapatan.

- b. Perencanaan Selalu Berorientasi ke Masa Depan  
Perencanaan fasilitas di Benteng Oranje memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadikannya ruang rekreasi representatif.
- c. Perencanaan Memberikan Perhatian pada Keterkaitan antara Pencapaian Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan  
Terbentuknya tim khusus dari komunitas yang rutin mengadakan rapat bersama UMKM dan masyarakat, yang hasilnya menjadi masukan pengambilan keputusan, mengindikasikan keterkaitan erat ini.
- d. Perencanaan Mengedepankan Kebijakan dan Program yang Komprehensif  
Program seperti "Warung Pangan Gratis" yang didukung berbagai pihak menunjukkan keberhasilan program yang diterima masyarakat, serta kebutuhan dukungan Pemda terhadap kreativitas komunitas.



**Gambar 2. Rencana Pengembangan Kawasan Benteng Oranje**

### Peran Regulasi dan Kebijakan Daerah

Regulasi dan kebijakan daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ditemukan menjadi instrumen krusial dalam transformasi Benteng Oranje. RTRW ini memberikan kerangka hukum dan arah politik pembangunan untuk pemanfaatan dan pengelolaan ruang. Implementasinya berhasil mentransformasi benteng dari area yang tidak terkelola (markas TNI/Polri dan pedagang kaki lima) menjadi

ruang publik yang tertata. Keterlibatan BAPPELITBANGDA sebagai koordinator perencanaan memastikan integrasi kebijakan nasional (UU No. 26/2007, PP No. 68/2010) dengan konteks lokal, serta memfasilitasi kolaborasi *multi-stakeholder*.

## PEMBAHASAN

Pembahasan ini menganalisis temuan penelitian mengenai peran BAPPELITBANGDA dalam transformasi Benteng Oranje sebagai ruang publik, dengan mengintegrasikan kerangka teoritis perencanaan, tata ruang, administrasi pembangunan, dan kebijakan daerah. Analisis ini akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dalam konteks revitalisasi cagar budaya menjadi ruang publik yang fungsional dan bermakna.

### Refungsionalisasi Benteng Oranje

Temuan penelitian bahwa manfaat Benteng Oranje secara kebudayaan mendukung argumentasi bahwa ruang publik adalah lebih dari sekadar infrastruktur fisik; ia merupakan arena vital bagi pembentukan, ekspresi, dan pemeliharaan identitas kolektif suatu masyarakat (Hardiman, 2014). Sebelum inisiatif revitalisasi, Benteng Oranje menghadapi krisis identitas fungsional. Penggunaan ganda sebagai markas militer oleh TNI/Polri, ditambah dengan peluberan fungsi oleh pedagang kaki lima, menciptakan kesan kumuh dan tidak teratur (Oesman et al., 2023). Kondisi ini tidak hanya mengaburkan nilai historis benteng, tetapi juga menghambat potensinya sebagai *public sphere* yang inklusif dan bermakna.

Transformasi yang terjadi kemudian bukan sekadar restorasi fisik, melainkan refungsionalisasi yang strategis untuk mengembalikan dan memperkaya identitasnya. Proses ini mengukuhkan peran Benteng Oranje sebagai "memori kolektif" kota, tempat di mana sejarah dapat berinteraksi dengan kehidupan kontemporer. Konsep *public sphere* Habermas (1989) menggarisbawahi pentingnya

ruang di mana warga dapat berdiskusi dan membentuk opini publik. Dalam konteks Benteng Oranje, ruang ini memungkinkan "kerumunan" pengunjung yang tadinya pasif bertransformasi menjadi "komunitas" yang aktif melalui interaksi sosial, pertukaran ide, dan aktivitas bersama yang diorganisir oleh komunitas lokal.

Kehadiran komunitas dan UMKM yang aktif mengaktivasi ruang ini menjadi bukti nyata bahwa pelestarian cagar budaya dapat secara efektif diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat. Hal ini menciptakan ruang yang tidak hanya bernilai historis, tetapi juga memiliki relevansi kultural dan vitalitas ekonomi. Pendekatan ini selaras dengan pandangan yang menekankan bahwa ruang publik yang sukses adalah ruang yang multifungsi, mampu mengakomodasi beragam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya secara simultan, sehingga meningkatkan kualitas hidup urban (Yaralioglu & Kara, 2025)(Riberu et al., 2024)(Mashary Alnaim & Noaime, 2023).

### **Perencanaan Kebermanfaatan dan Keberlanjutan**

Konsep perencanaan yang mengedepankan prinsip kebermanfaatan dan keberlanjutan, sebagaimana diimplementasikan oleh BAPPELITBANGDA Kota Ternate, merupakan representasi dari pendekatan administrasi pembangunan yang responsif dan visioner. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi (Devi, 2024).

Proses perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai Pemerintah Kota Ternate, perwakilan Kementerian (BPCB), dan komunitas lokal, menunjukkan komitmen terhadap model perencanaan partisipatif. Model ini sangat esensial dalam konteks administrasi publik modern, di mana keputusan yang transparan dan inklusif cenderung menghasilkan legitimasi yang lebih tinggi dan dukungan masyarakat yang lebih kuat (Yadav, 2024).

Keterlibatan berbagai pihak ini sangat krusial dalam menengahi potensi konflik kepentingan yang sering muncul dalam pengembangan ruang kota, terutama antara kepentingan pelestarian (diwakili BPCB), kebutuhan ekonomi (UMKM), dan aspirasi sosial (komunitas), serta visi pembangunan (Pemda). Dengan mengintegrasikan perspektif yang beragam, perencanaan Benteng Oranje berhasil menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional secara fisik tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan relevansi budaya yang kuat.

Prinsip keberlanjutan di sini melampaui dimensi fisik bangunan, ia mencakup keberlanjutan fungsi sosial benteng sebagai pusat interaksi, keberlanjutan ekonomi bagi pelaku UMKM, dan keberlanjutan budaya sebagai situs historis yang hidup. BAPPELITBANGDA, dalam perannya sebagai koordinator, menjadi fasilitator utama dalam merajut berbagai kepentingan ini menjadi satu kesatuan rencana yang koheren dan berkelanjutan.

### **Implementasi Strategi Pengembangan**

Strategi "3P" (Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan) yang menjadi inti pengembangan Benteng Oranje adalah kerangka kebijakan yang cerdas, menyeimbangkan antara konservasi warisan budaya dan utilitas publik. Strategi ini secara efektif termanifestasi melalui empat dimensi perencanaan Friedmann (1987), yang memberikan lensa teoritis kuat untuk menganalisis praktik perencanaan di lapangan:

1. Perencanaan sebagai cara memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi, terbukti dalam dampak positif revitalisasi Benteng Oranje terhadap UMKM lokal. Pemanfaatan ruang publik ini telah menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku ekonomi mikro, menunjukkan bahwa perencanaan yang strategis dapat menjadi instrumen ampuh untuk pembangunan ekonomi inklusif dan pemberdayaan masyarakat (Friedmann, 1987). Ini adalah contoh bagaimana kebijakan tata ruang dapat secara langsung

berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal, alih-alih hanya menjadi instrumen regulasi fisik semata.

2. Perencanaan yang selalu berorientasi ke masa depan, tecermin dalam visi jangka panjang BAPPELITBANGDA untuk menjadikan Benteng Oranje sebagai ruang rekreasi representatif. Visi ini tidak hanya sekadar membangun fisik, tetapi juga membayangkan bagaimana ruang tersebut akan berfungsi dan memberikan nilai bagi generasi mendatang. Orientasi ke depan ini esensial untuk pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa intervensi saat ini tidak mengorbankan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan, secara jelas terwujud melalui partisipasi aktif komunitas dalam rapat-rapat perencanaan. Pembentukan tim khusus dari komunitas yang rutin mengadakan rapat bersama UMKM dan masyarakat untuk merumuskan agenda dan masukan bagi pengambilan keputusan menunjukkan adanya mekanisme partisipatif yang efektif. Proses ini memperkuat legitimasi kebijakan dan program yang dihasilkan, karena melibatkan mereka yang secara langsung terdampak oleh keputusan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori perencanaan deliberatif yang menekankan pentingnya dialog dan konsensus dalam pengambilan keputusan publik (Forester, 1989).
4. Perencanaan yang mengedepankan kebijakan dan program komprehensif, terbukti dari keberhasilan program-program seperti "Warung Pangan Gratis" yang didukung luas oleh masyarakat. Program semacam ini menunjukkan bahwa kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan sosial dapat membangun dukungan sosial yang kuat dan memperkuat rasa memiliki terhadap ruang publik. Dalam dimensi ini, BAPPELITBANGDA tidak hanya berfungsi sebagai perumus kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dan koordinator untuk memastikan bahwa strategi ini diimplementasikan

secara sinergis dan menyeluruh, melibatkan berbagai sektor dan aktor.

### **Peran Regulasi dan Kebijakan Daerah dalam Tata Kelola Ruang Publik**

Peran regulasi dan kebijakan daerah adalah fondasi krusial bagi keberhasilan transformasi Benteng Oranje. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai *master plan* yang mengikat, memberikan legitimasi hukum dan arah strategis bagi semua aktivitas pembangunan di wilayah kota, termasuk pengelolaan cagar budaya dan ruang publik. RTRW ini bukan sekadar dokumen teknis, melainkan instrumen politik yang merefleksikan prioritas pembangunan daerah.

Sebelumnya, kondisi Benteng Oranje yang tidak tertata, diwarnai oleh penggunaan yang tidak terkoordinasi, menunjukkan adanya *gap* antara kerangka regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan. Fenomena ini seringkali menjadi tantangan dalam administrasi publik di mana regulasi yang ada tidak selalu secara efektif dioperasionalkan. Namun, intervensi aktif BAPPELITBANGDA dalam mengintegrasikan RTRW dengan rencana revitalisasi Benteng Oranje berhasil mengatasi disfungsi ini. BAPPELITBANGDA, sebagai organ perencanaan utama, tidak hanya merumuskan rencana tetapi juga mengoordinasikan implementasinya. Hal ini termasuk penertiban area informal yang ditempati pedagang kaki lima dan kolaborasi erat dengan BPCB untuk memastikan aspek pelestarian fisik cagar budaya terpenuhi.

Keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menegakkan kebijakan tata ruang yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ini juga mencerminkan upaya Pemda untuk menyeimbangkan tuntutan pembangunan ekonomi dan pelestarian

warisan budaya, sebuah tugas yang kompleks dan seringkali penuh dilema dalam administrasi publik perkotaan (Liu et al., 2024).

Keberhasilan Benteng Oranje menjadi ruang publik yang fungsional, estetik, dan ekonomis adalah cerminan dari kapasitas administrasi daerah dalam menerjemahkan kebijakan makro ke dalam tindakan mikro yang berdampak positif pada kualitas lingkungan urban dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, BAPPELITBANGDA tidak hanya berperan sebagai pembuat rencana, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengorkestrasi berbagai kepentingan dan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Revitalisasi Benteng Oranje telah berhasil mengembalikan dan memperkuat identitas kebudayaannya. Dari kondisi disfungsi sebagai markas militer dan area informal pedagang kaki lima, Benteng Oranje kini berfungsi sebagai *public sphere* yang dinamis, memfasilitasi interaksi sosial dan aktivitas komunitas serta UMKM, yang secara signifikan berkontribusi pada pelestarian sejarah dan pengembangan ekonomi lokal. Konsep perencanaan yang diterapkan BAPPELITBANGDA, yang mengutamakan prinsip kebermanfaatan dan keberlanjutan, menjadi kunci keberhasilan ini. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi *multi-stakeholder* dan Pemerintah Kota, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), dan komunitas mencerminkan administrasi pembangunan yang responsif dan partisipatif. Strategi pengembangan Benteng Oranje, yang berlandaskan pada perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan (3P) telah efektif dalam menyeimbangkan konservasi warisan budaya dengan utilitas publik. Implementasi strategi ini terbukti selaras dengan empat dimensi perencanaan *Friedmann*, di mana perencanaan mampu memecahkan persoalan sosial ekonomi, berorientasi ke masa depan, mengaitkan tujuan dengan pengambilan keputusan partisipatif, serta mengedepankan

program yang komprehensif. Secara fundamental, peran regulasi dan kebijakan daerah adalah fondasi utama transformasi ini. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menyediakan kerangka hukum dan arah strategis yang esensial. BAPPELITBANGDA, sebagai koordinator perencanaan, berhasil mengorkestrasi berbagai kepentingan dan sumber daya, menerjemahkan kebijakan tata ruang ke dalam tindakan nyata yang berdampak positif pada kualitas lingkungan urban dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Benteng Oranje sebagai ruang publik yang fungsional dan bermakna menegaskan kapasitas administrasi daerah dalam mengelola cagar budaya sebagai aset pembangunan yang berkelanjutan.

## REFERENSI

- Amal, M. A. (2010). *Kepulauan rempah-rempah perjalanan Maluku Utara, 1250-1950*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Bravo, L., McCormick, M., & Hillary, F. (2022). Creative Practices in the Public Realm. *The Journal of Public Space*, 7(3), 1–4. <https://doi.org/10.32891/jps.v7i3.1660>
- Creswell, J. ., & Creswell, J. D. (2004). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd.
- Devi, A. B. (2024). *Sustainability Management Practices Integrating Environmental, Social, And Economic Factors For Long Term Success, Educational Administration: Theory and Practice*. 2024(5), 9386–9401. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.4570>
- Forester, J. F. (1989). *Planning in the Face of Power*. University of California Press.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton University Press.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Hardiman, F. B. (2014). *RUANG PUBLIK, Melacak*



- "Partisipasi Demokrasi" dari Polis sampai Cyberspace. Canisius.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd ed.). Sage Publications.
- Liu, H., Lee, C., & Goh, J. (2024). *Introduction : Agile governance for a volatile , uncertain , complex and ambiguous world. August, 5–11.* <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13439>
- Luger, J., & Lees, L. (2022). Revisiting urban public space through the lens of the 2020 global lockdown. *Urban Geography*, 43(6), 797–809. <https://doi.org/10.1080/02723638.2022.2073084>
- Mashary Alnaim, M., & Noaime, E. (2023). Evaluating public spaces in Hail, Saudi Arabia: A reflection on cultural changes and user perceptions. *Alexandria Engineering Journal*, 71, 51–72. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.03.027>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook (Edition 3)*. SAGE.
- Oesman, H., Sb, A., & Usman, S. (2023). *FORT ORANJE : Identitas, Integrasi, Ruang Permukiman*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). Sage Publications.
- Riberu, M. G., Wulandary, R. M. C., & Ra'is, D. U. (2024). Inovasi Jaringan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Jalan Pintas) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan. *Indonesian Social Science Review*, 2(1), 20–30. <https://doi.org/10.61105/issr.v2i1.72>
- Schreiber, F. (2020). When Digital Public Spaces Matter. Role of Neighbourhood Platforms in Times of COVID-19. *The Journal of Public Space*, 5(Vol. 5 n. 3), 121–130. <https://doi.org/10.32891/jps.v5i3.1368>
- Staab, P., & Thiel, T. (2022). Social Media and the Digital Structural Transformation of the Public Sphere. *Theory, Culture and Society*, 39(4), 129–143. <https://doi.org/10.1177/02632764221103527>
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. Alfabeta.
- Tarrafa Silva, A., Pereira Roders, A., Cunha Ferreira, T., & Nevzgodin, I. (2023). Critical Analysis of Policy Integration Degrees between Heritage Conservation and Spatial Planning in Amsterdam and Ballarat. *Land*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/land12051040>
- Yadav, B. (2024). Citizen Participation in Government Decision-Making. *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*, 9(4), 267–271. <https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n04.033>
- Yaralioglu, I., & Kara, C. (2025). Sustainable Urban Design Approach for Public Spaces Using an Analytical Hierarchy Process (AHP). *Land*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/land14010019>